



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 05 Maret 2018

Halaman: 11

Pemilih Masih Cenderung Coblos Caleg Laki-laki

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif memang masih di bawah 30 persen. Meskipun, pada saat pendaftaran calon legislatif (caleg) dan juga pengurus partai politik angka keterwakilan perempuan memenuhi syarat.

Komisioner KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Farid Bambang Siswanto men-

• ke halaman 11

Pemilih Masih Cenderung

• Sambungan Hal 1

jelaskan, keterwakilan perempuan pada saat duduk di kursi legislatif masih kurang dari 30 persen. Hal ini tak lepas dari budaya dan juga pandangan masyarakat yang masih memandang laki-laki lebih cocok menjadi politisi.

Hal ini dapat dilihat dari keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi DIY yang berjumlah 10 dari 44 anggota legislatif. Artinya, keterwakilan perempuan belum mencapai 30 persen dan baru 25 persen. Di DPRD Provinsi DIY, hanya terdapat enam legislator perempuan dari 55 anggota.

"Kalau yang terpilih dan duduk di kursi legislatif tidak ada 30 persen. Tapi pada saat penyerahan berkas dan pengurus sudah lebih dari 30 persen. Bankan, ada satu partai yang pengurusnya didominasi perempuan," kata Farid saat ditemui Tribun Jogja, pekan lalu.

Patriarki

Farid menjelaskan, persoalan keterwakilan perempuan dalam legislatif yang masih belum sesuai dengan Int Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada pasal 245 disinggung tentang keterlibatan perempuan minimal 30 persen. Hal ini, kata dia dapat dipengaruhi oleh beragam faktor.

Budaya patriarki yang masih tumbuh surut dan stereotip laki-laki coblos gal pasti di atas perempuan menjadi salah satu sebab. Sehingga, kendala rungan masyarakat untuk memilih caleg laki-laki dibanding perempuan pun masih cukup tinggi.

"Hal itu terjadi karena partai berada dalam kancang masyarakatnya. Masyarakat

yang sebagian rupa memberi peran penting pada perempuan, Namun, dibandingkan negara ASEAN dan Asia, Indonesia jauh lebih baik posisi perempuannya di parlemen," ujarnya.

Adapun, jika masih ada kesulitan untuk mencari kader perempuan dalam berpolitik, juga dipengaruhi stigma yang melekat bahwa politik menjadi urusan laki-laki. Hal ini, kata dia berlaku pula pada ranah kehidupan yang lain.

Di samping itu, setiap peserta Pileg harus menjalani langkah dalam kontestasi yang berarti perjuangan yang berat. Sementara, banyak perempuan memiliki keterbatasan dalam waktu untuk bisa bertemu dengan konstituen.

Sementara, dalam ketentuan suara terbanyak di partai politik pun pengulatan antar caleg begitu tinggi. Perempuan masih tidak mau akan bermusuhan dengan sesama anggota partai. Dan dalam hal ini karena dipandang tidak terlalu berani, yang menjadi korban adalah perempuan.

Dicoret

Farid menegaskan, KPU berupaya melaksanakan aturan mengenai keterwakilan perempuan ini dengan cukup ketat. Dalam regulasi tersebut diatur sejak pendaftaran pengurus pun sudah harus mencapai 30 persen. Jadi, jika ada partai politik yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, sudah tentu akan dicoret dari daftar partai yang akan mengikuti pemilu.

Disinggung adanya partai yang dimungkinkan menggaet calon perempuan untuk sekadar formalitas dan menggugurkan wacana. Farid menampik. Hal tersebut dimungkinkan ada sebagai salah satu upaya agar partai tetap bisa mengikuti Pemilu.

"Kalau hanya untuk menggugurkan kewajiban, kami ti-

da bisa melaksanakan partai. Mungkin ada hal lain, karena partai juga menjadi cemilan masyarakat," paparnya.

Apalagi, dimungkinkan ada partai yang melakukan hal formalitas ini karena bacaleg perempuannya belum teruji secara elektabilitas. Sejumlah spekulasi pun bisa muncul. Namun, dia berharap untuk Pileg yang akan datang benar-benar menghasilkan legislatif perempuan yang memang teruji secara kualitas dan kuantitasnya di perolehnya.

KPU Bantul maupun Sleman juga membenarkan, bahwa keterwakilan bacaleg perempuan 30 persen berlaku hingga tingkat kabupaten. "Di pasal 245 disebutkan daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan pada partai sekitar 30 persen," kata Ketua KPU Kabupaten Bantul, M. Johan Komara.

Waktu perbaikan

Ketua KPU Sleman Ahmad Shidiqi menjelaskan bahwa partai yang tidak bisa keterwakilan bacaleg perempuan 30 persen maka akan diberi waktu untuk melaksanakan perbaikan.

"Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan 30 persen, KPU memberikan kesempatan kepada partai untuk memperbaiki daftar calon tersebut," jelaskannya.

Shidiqi tak menampik bahwa tak sedikit partai yang mengajukan bacaleg perempuan semata hanya untuk memenuhi persyaratan saja. "Ya itu terserah internal partai," katanya.

Mengenai peraturan pada Pileg 2024 mendatang Shidiqi belum bisa memberikan jawaban. Pasalnya, hingga kini pihaknya belum tahu persis peraturannya seperti apa. Sebab KPU pusat hingga saat ini belum menulis peraturan resmi terkait pemilihan legislatif mendatang. (sis/ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005